

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

-, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- A.R Sitorus, 2019. *Sanksi Pidana atau hukuman*. YoE-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Aditya, Umi Rozah, 2015, *Asas dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori*
- Azhar, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Inderalaya.
- B. J Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung..
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya
- Edi Setiadi, 2003, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Bahan Kuliah Pasca Unisba. Bandung.
- Gatot Supramono, 2015, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- H. Amrani dan Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Press, Jakarta
- Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Hasanal Mulkan, dan Serlika Aprita, 2023, *Hukum Tindak Pidana Lingkungan*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Penerbit Kepel Press, Jakarta.
- Koeswadji, Hermen Hadiati, 1995, *Perkembangan Macam-Maca, Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- M. Aenur Rosyid, 2020, *buku Ajara Hukum Pidana*, IAIN Jember, Jember.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*. Armico, Bandung
- Mudzakir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.
- Nommy Horas Thombang Siahaan, 2004, *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga, Jakarta.
- Nur Syarifah, Et,Al., 2020, *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup*, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Indonesia Institute for Independent Judiciary, Jakarta.
- Pemidanaan*, Penerbit Pustaka Magister, Jarkarta..
- Saidah, 2021, *"Hukum Pidana Lingkungan"*. IAIN Parepare Nusantara Press, Sulawesi Selatan.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet III, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Sutamihardja, 2004, *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan, Edisi Kedua*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha. Jakarta
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun.

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

Permentan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

JURNAL

Ainun Jiwanti, 2023, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang -Undang Cipta Kerja*, Justisi, Vol.9, No.2, 2023.

Alfikri, 2021, “*Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*”. Jurnal Eksekusi, Vol.3, No.1, 2021.

Asri, A, 2020, “*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara,” Vol.10, No.1, 2020.

Darmika, I. M. R., Dewi, S. L., & Widyantara, I. M. M, 2022, “*Tindakan Kriminalisasi Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia*”, Res Nullius Law Journal, Vol. 4, No. 2, 2022.

Irawan, 2015, “*Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*”, Ganec Swara, Vol. 9, No. 2, 2015.

Jan Horas dan Tungkat Sipayung, 2017, “*Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Perkembangan Berkelanjutan*”. Journal Masyarakat Indonesia, Vol.43, No.1, 2017.

Junaidi, Et. Al. ,2023, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Limbah B3*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 10, No.9, 2023

Kania Tamara, Siti Kotijah, dan Rini Apriyani, 2021, *Penerapan Asas Prium Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal SASI, Vol.27, No.3, 2021

N.A Rachmat, 2022, *Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.Law Journal, Vol.2 No.2, 2022

Nasrullah, Arissaputri, S. N., Kholifah, S. N., Halima, N. H., dan Yosivatama, C. D, 2022, “Efektivitas Pemberlakuan Uu Cipta Kerja Dalam Pengelolaan Limbah B3.” Reasearch Publication, 2022

Nugraha, M.S.W dan Putrawan, 2018, *Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Undang -Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol.7, No. 2, 2018.

Sahat Maruli T. S, 2022, “Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Dan Terhadap Seseorang dengan Menggunakan Instrumen Undang-Undang ITE”. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No.2, 2022

Sodikin, 2010, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Kanun, No.52 2010.

Wibisana, A, 2019, *Tentang Ekor yang tak lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.6, No.1, 2019.

Yanti, A. dan Fitri W., 2022, “Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja : Studi Komparatif Negara Jepang.” Mulawarman Law Review, Vol. 7, No. 1, 2022.

SKRIPSI

Adrian, Fikri, 2022, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Rumah Sakit/Rumah Sakit Darurat Terhadap Pengelolaan Limbah Medis B3 Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia.” Skripsi Sarjana Hukum Universitas Andalas, Padang.

INTERNET

BBC NEWS Indonesia, “Limbah Sawit dicoret dari daftar berbahaya : Pemerintah pastikan pengawasan, Walhi sebut perusahaan bisa lepas dari jerat hukum bila ada pencemaran”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56393482> , dikunjungi pada tanggal 21 Oktober 2023.

Cakra, I Putu Eka, & Sulistyawan, Aditya Yuli, “Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia”, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.59-69>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.

Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah Limbah B3, “*CARBON WASTE MANAGEMENT TO REDUCE GREEN HOUSE GAS FROM LANDFILL IN INDUSTRIAL*”

- ACTIVITY*”, <https://pslb3.menlhk.go.id/portal/read/carbon-waste-management-to-reduce-green-house-gas-from-landfill-in-industrial-activity>, dikunjungi pada tanggal 19 Oktober 2023.
- Hariandja, R, “Mengapa Lingkungan Hidup Terancam dengan Ada Omnibus Law”, <https://www.mongabay.co.id/2020/10/21/mengapa-lingkungan-hidup-terancam-dengan-ada-omnibus-law/>, dikunjungi pada tanggal 23 Oktober 2023.
- Herikson Roxsli, “Limbah beracun PKS Yuni Bersaudara di Desa Teluk Paman TimurKampar Mengalir ke Perkebunan Warga”, <https://radarpekanbaru.com/news/detail/21260/limbah-beracun-pks-yuni-bersaudara-di-desa-teluk-paman-timur-kampar-mengalir-ke-perkebunan-warga>, dikunjungi pada tanggal 10 Desember 2023.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Dua Tersangka Pencemaran Lingkungan Hidup Di Riau”, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7087/dua-tersangka-pencemaran-lingkungan-hidup-di-riau-segera-disidangkan>, dikunjungi pada tanggal 21 Oktober 2023.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Gakkum KLHK : Tahan Dua TersangkaKasus Dumping Limbah B3 dan Pembukaan kebun Sawit Ilegal”, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6639/gakkum-klhk-tahan-dua-tersangka-kasus-dumping-limbah-b3-dan-pembukaan-kebun-sawit-ilegal>, dikunjungi pada tanggal 21 Oktober 2023.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Refleksi KLHK 2021 : CapaianPengelolaan Sampah, Limbah dan B3”, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7087/dua-tersangka-pencemaran-lingkungan-hidup-di-riau-segera-disidangkan>.
- Maulana, R, 2021, “Konsep Persetujuan Lingkungan: Amankah untuk Lingkungan?”, <https://www.forestdigest.com/detail/1259/apa-itu-persetujuanlingkungan>.Diakses 15/10/2023.
- Veronika Adyani, “Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun”, [file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/567135433a94d9999e9b96b51049f4b9%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/567135433a94d9999e9b96b51049f4b9%20(1).pdf), dikunjungi pada tanggal 30 November 2023
- Yusti Nurul Agustin, 2024, “Saksi dan Ahli Pemerintah Ungkap Dampak Buruk Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin”, <https://mkri.go.id/>.